

Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Demak)

Husnurrosyidah

IAIN Kudus

husnurrosyidah@stainkudus.ac.id

Ginanjjar Suendro

Universitas Semarang

gsuendro@gmail.com

ABSTRACT

The potential for misuse of the funds of the village in Indonesia has increased due to misconstrued one side, basic education is the head of the village and its officials not derived from competencies of accounting. The village chief has the desire and the hope that created a computerized accounting system to simplify financial reporting the village Fund. Thus, a good Accounting System in conducting employee administration finance village Fund will be able to reduce the potential for abuse of the village Fund. This research aims to know the influence of the accounting system and accounting competency against the potential misuse of funds. This research is the research field (field research) with a quantitative approach. The data used are the primary data with survey methods through the dissemination of the questionnaire. There are two independent variables in this study i.e. (X 1) accounting systems and accounting competency (x 2). The dependent variable (Y) village Fund abuse. The technique of sampling using random sampling so that the retrieved samples of the 101 people who represent their respective villages in Kabupaten Demak. The results showed that 1) influential accounting systems against misuse of funds i.e. village of 0762 with p-value < 0.01; 2) influential accounting competency against the misappropriation of funds of the village i.e. of 0461 with p-value = 0.07.

Keywords: *Accounting Systems; Accounting Competencies; Potential Abuse of the Village Fund*

ABSTRAK

Potensi penyalahgunaan dana desa di Indonesia semakin meningkat karena disalah satu sisi, dasar pendidikan kepala desa dan aparatnya bukan berasal dari kompetensi akuntansi. Kepala desa memiliki keinginan dan harapan agar diciptakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk memudahkan pelaporan keuangan dana desa. Dengan demikian, Sistem Akuntansi yang baik didalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dana desa akan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi dan kompetensi akuntansi terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu (X_1) sistem akuntansi dan (X_2) kompetensi akuntansi. Variabel dependen (Y) penyalahgunaan dana desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling sehingga diperoleh sampel 101 orang yang mewakili masing-masing desa di Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem akuntansi berpengaruh terhadap penyalahgunaan dana desa yaitu sebesar 0.762 dengan p -value < 0.01 ; 2) kompetensi akuntansi berpengaruh terhadap penyalahgunaan dana desa yaitu sebesar 0.461 dengan p -value = 0.07.

Kata kunci: Sistem Akuntansi; Kompetensi Akuntansi; Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, (Eko, 2014: 2) dikutip dalam Ismail (Ismail, 2016) Menyatakan bahwa Negara berdiri mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. (Hoesada, 2016: 231) menyatakan bahwa Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari Negara. (Brodjonegoro, 2014) dikutip dalam Ismail (2016) menyatakan bahwa Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat". (BPKP 2015: 2) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik

bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya.

Undang-undang desa tersebut diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada, 2014). Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro, 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015).

Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto 2009). Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Yuliana 2013). Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini (Basri 2014). Terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat

pemerintah desa yang masih minim. Sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kemampuan aparatur desa yang masih rendah untuk hal keuangan akan berpotensi munculnya penyalahgunaan dana desa bagi pelaku pemerintahan desa. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Bersama Demak Bersatu (FBDB), mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak mendesak pengusutan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 sebesar Rp 22 milyar. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap indikasi penyalahgunaan dana Negara (Rifai, 2015).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak menganulir kewenangan Pemerintah Desa berupa fungsi penganggaran. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) itu regulasinya sudah jelas. Pencairan dilakukan dalam 2 tahap pertahun. Semua dana harus tersalur ke rekening desa. Jika ada sisa anggaran harusnya masuk APBDes bukan silpa Kabupaten Demak. Silpa tahun 2015 sebanyak 22 Milyar Rupiah disebut sebagai dana kurang salur. Dana kurang salur tersebut akan dicairkan pada tahun anggaran 2016, dengan berdasar pada Perbup Nomor 5 tahun 2016.

Demak hanya satu satunya Kabupaten yang menggunakan istilah 'dana kurang salur' untuk anggaran yang tidak habis dipakai pada tahun anggaran 2015. Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan pada tahun 2016. Para aktivis Demak menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Demak agar membentuk panitia khusus yang akan mengusut dana sisa yang tak terserap pada tahun anggaran 2015. Oleh karena kasus tersebut, wakil ketua DPRD Demak meminta audit BPK, serta pengawasan penuh dari inspektorat terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Maka dari itu Sistem Akuntansi sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintah Kabupaten Demak terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan juga sesuai dengan prosedur yang semestinya agar dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten Demak dalam hal yang berkaitan dengan dana Desa (Rifai, 2015).

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mulyadi, (2001) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Penelitian Ismail *et al.* (2016) mengenai sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa permasalahan utama yang timbul terkait pengelolaan

dana desa adalah rendahnya pengetahuan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan dasar pendidikan kepala desa dan aparatnya bukan dari bidang akuntansi. Kepala desa memiliki keinginan dan harapan untuk diciptakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk memudahkan pelaporan keuangan dana desa. Dengan demikian, Sistem Akuntansi yang baik didalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dana desa akan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.

Kompetensi Akuntansi ditentukan oleh 4 (empat) faktor yaitu kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*), motivasi dan lingkungan (*enviromtent and motivation*) (Libby & Luft, 1993:433). Kompetensi dalam bidang Akuntansi merupakan kemampuan unjuk kerja keahlian, yang dibentuk melalui pengetahuan, ketrampilan dan pembinaan sikap tentang Akuntansi. Kompetensi akuntansi seseorang dapat dilihat dari kemampuannya memenuhi tuntutan spesifikasi pekerjaan, dan kemampuan tingkah laku unjuk kerja dalam menangani pekerjaan dalam kegiatan Akuntansi. Penelitian menyatakan bahwa kompetensi akuntansi mempengaruhi keterampilan berfikir kritis dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi berpengaruh terhadap penyalahgunaan Dana Desa?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa.

TINJAUAN LITERATUR

Sistem Akuntansi dan Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Mulyadi (2001; 3) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto 2009). Penelitian Riyani (2016) menunjukkan bahwa Analisis Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai

dengan rencana namun masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki. Hal ini berarti bahwa masih ada evaluasi terkait dengan penggunaan dana desa, terutama mengenai laporan keuangan dana desa.

Penelitian Ismail *et al.* (2016) mengenai sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa permasalahan utama yang timbul terkait pengelolaan dana desa adalah rendahnya pengetahuan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan dasar pendidikan kepala desa dan aparatnya bukan dari bidang akuntansi. Kepala desa memiliki keinginan dan harapan untuk diciptakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk memudahkan pelaporan keuangan dana desa. Dengan demikian, Sistem Akuntansi yang baik didalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dana desa akan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Ada pengaruh antara Sistem Akuntansi terhadap potensi penyalahgunaan Dana Desa.

Kompetensi Akuntansi dan Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi - inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan, kemampuan serta perilaku dari seorang pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Gibson (dalam Widyatmini 2008) dari berbagai sumber, antara lain bahwa kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja (Gibson, 2004 dalam Widyatmini, 2008). Definisi lain menyatakan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Kumorotomo, 2005).

Akuntansi mengandung dimensi proses dan aktivitas yang memerlukan pengkajian untuk mempelajarinya. Wujud hasil mempelajari pengetahuan Akuntansi dikenal dengan kompetensi Akuntansi. Dari segi dimensi, proses Akuntansi merupakan tindakan identifikasi, pengukuran dan komunikasi tentang pendapat dan keputusan yang secara ekonomis dibutuhkan oleh penggunaanya (Hermanson, Edwards & Salmonson, 1989: 3).

Pekerjaan Akuntansi berada dalam rangkaian kegiatan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan dan penginterpretasian transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk memungkinkan adanya *assesment* dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (P2A, Depdikbud, 1989: 15).

Kompetensi dalam bidang Akuntansi merupakan kemampuan unjuk kerja, keahlian, yang dibentuk melalui pengetahuan, ketrampilan dan pembinaan sikap tentang Akuntansi. Kompetensi akuntansi seseorang dapat dilihat dari

kemampuannya memenuhi tuntutan spesifikasi pekerjaan, dan atau kemampuan tingkah laku unjuk kerja dalam menangani pekerjaan dalam kegiatan Akuntansi.

Kompetensi Akuntansi ditentukan oleh 4 (empat) faktor yaitu (1) kemampuan (*ability*), (2) pengetahuan (*knowledge*), (3) motivasi, dan (4) lingkungan (*environment and motivation*) (Libby & Luft, 1993: 433).

Kemampuan individu merupakan kapasitas tugas pendukung untuk melengkapi informasi, seperti koding informasi (*information encoding*), pemanggilan (*retrieval*) dan analisis. Pengetahuan yang dimiliki (*knowledge - information stored in memory*) yakni informasi yang telah terekam dalam memori yang dapat menunjukkan sejauh mana individu telah menguasai tugas pekerjaan tertentu bidang Akuntansi (pengetahuan prosedural); fakta-fakta yang dibutuhkan (pengetahuan deklaratif); dan bagaimana kegiatan yang sesuai dengan tuntutan profesi bidang akuntansi.

Pertimbangan dari lingkungan Akuntansi dan gambaran tentang arahan dari yang berwenang seperti program audit komputer, insentif keuangan, hubungan akuntabilitas, dan proses *review* formal dan informal. Lingkungan memberi peluang yang berbeda-beda untuk belajar; lingkungan yang baik akan memberi lebih banyak bahan belajar, dan begitu sebaliknya. Motivasi yang terkait erat dengan kemauan individu untuk memanfaatkan potensinya. Model dari keempat unsur ini memang sederhana,

Berdasarkan beberapa definisi dan penegasan ahli dapat disimpulkan bahwa kompetensi Akuntansi mengandung penguasaan kemampuan dan aktivitas yang berproses mengikuti prosedur tertentu tahap demi tahap. Tahapan-tahapan itu mulai dari mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, melaporkan dan menginterpretasikan transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Proses itu bertujuan menyediakan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk tujuan pengambilan keputusan dan sebagai sarana evaluasi kegiatan bisnis. Dengan demikian penguasaan kompetensi Akuntansi seseorang dapat diukur dari kemampuan memenuhi tuntutan pekerjaan pada tahapan tertentu atau kemampuan unjuk kerja dalam menangani kegiatan-kegiatan dalam proses akuntansi.

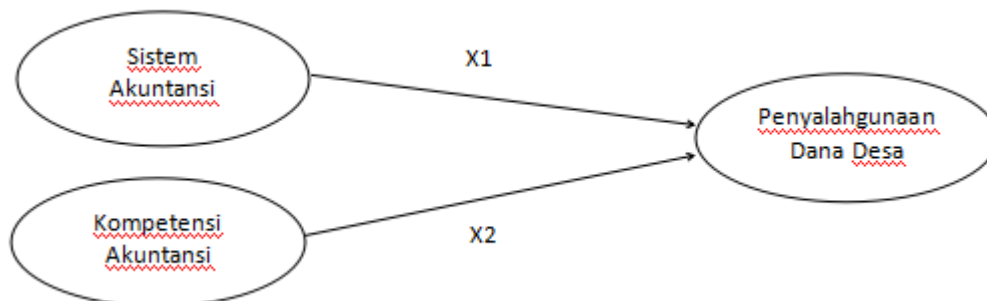
Aparatur desa yang memiliki kompetensi akuntansi mengandung arti penguasaan kemampuan dan aktivitas mengikuti prosedur akuntansi yang benar sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan berkualitas sehingga menghindarkan aparatur desa dari penyalahgunaan dana desa. Di dukung penelitian (Sholeh, 2017: 19) dinyatakan bahwa kompetensi akuntansi pegawai dan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Artinya, jika pegawai memiliki kompetensi yang baik dalam akuntansi ditunjang dengan teknologi informasi yang memadahi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga baik sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dana.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ada Pengaruh antara Kompetensi Akuntansi terhadap potensi penyalahgunaan Dana Desa

Model kerangka teoritis penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Teoritis Penelitian



Sumber: Ismail (2016), Bias Nuasa (2010), Yulianah (2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Terdapat dua variabel dalam yaitu variabel *dependen* (Y) dan variabel *independen* (X). Variabel *dependen* (Y) dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan dana desa. Variabel *independen* (X) terdiri dari dua variabel yaitu Sistem Akuntansi (X₁) dan Kompetensi Akuntansi (X₂).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data melalui survey dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel adalah *random sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini 101 responden yaitu aparatur pemerintah Desa Kabupaten Demak yang mewakili masing - masing desa di Kabupaten Demak.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji instrumen penelitian dan uji hipotesis. Metode statistik yang digunakan adalah teknik regresi dengan menggunakan *software warp PLS*. Adapun indikator dari masing-masing variabel adalah seperti berikut:

Tabel 1. Indikator Variabel

Keterangan	Indikator	Jurnal
Sistem Akuntansi	Penyusunan rencana Pelaksanaan proses akuntansi Prosedur pengumpulan Pelaporan data keuangan	Muhammad Ismail (2016)
Kompetensi Akuntansi	kemampuan (<i>ability</i>) pengetahuan (<i>knowledge</i>), Motivasi (<i>motivation</i>) lingkungan (<i>environment</i>)	Bias Nuasa.C.P (2014)
Potensi Penyalahgunaan Dana Desa	Pengelolaan Dana Rencana Kegiatan Kegiatan Administrasi Transparan Pengembangan Hasil Kegiatan	Yuyun Yulianah (2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan. Analisis deskriptif dihitung berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata (*mean*) dari setiap indikator yang diajukan untuk menggambarkan persepsi seluruh responden. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) tersebut, selanjutnya dilakukan *interpretasi* persepsi responden dengan menggunakan kriteria *three-box method* (Ferdinand, 2006), yaitu 1,0–2,3 = rendah, 2,4–3,7 = sedang, dan 3,8–5,0 = tinggi. Selanjutnya berdasarkan kriteria tersebut ditentukan indeks persepsi responden terhadap variabel-variabel dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Sistem Akuntansi	101	3	2	5	3.71	.203
Kompetensi Akuntansi	101	2	3	5	3.89	.059
Potensi Penyalahgunaan Dana Desa	101	3	1	4.56	3.90	.060
Valid N (<i>listwise</i>)	101					

Sumber: Data Primer diolah 2018

Berdasarkan hasil ditunjukkan bahwa persepsi jawaban pada variabel Sistem Akuntansi dalam kategori sedang, variabel Kompetensi Akuntansi dan potensi penyalahgunaan dana desa dalam kategori tinggi.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Konstruk:

Hasil pengujian *outer/measurement* model dengan menggunakan warp PLS diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Outer/Measurement Model

Konstruk	Range	AVE	Composite Reliability	Cronbach alpha
1. Sistem Akuntansi	0,492- 0,825	0,572	0,891	0,856
2. Kompetensi Akuntansi	0,599- 0.955	0,569	0,813	0,687
3. Potensi Penyalahgunaan Dana Desa	0,579-0,897	0,577	0,869	0,789

Sumber: Data primer 2018 yang diolah

Sesuai dengan prosedur pengujian SEM-PLS, maka evaluasi *validitas konvergen konstruk* menggunakan indikator berupa *loading factor* dan *average variance extracted (AVE)*. (Sholihin, 2013: 73) Hasil *outer model* dengan program *warp PLS* pada tabel 3 menunjukkan kriteria *validitas konvergen* telah terpenuhi yaitu *loading* lebih besar dari 0,60 dan *AVE* lebih besar dari 0,40. Hasil tersebut menunjukkan kriteria *validitas diskriminan* telah terpenuhi ditunjukkan dengan akar kuadrat *AVE* lebih besar daripada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing kolom. Demikian juga reliabilitas telah terpenuhi dengan *composite reliability* dan *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60.

Validitas Diskriminan

Hasil pengujian *validitas diskriminan* ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Correlations among latent variables

Variabel	Sistem Akuntansi	Kompetensi Akuntansi	Potensi Penyalahgunaan Dana Desa
Sistem Akuntansi	0.701	0.225	0.308
Kompetensi Akuntansi	0.225	0.814	0.528
Penyalahgunaan Dana Desa	0.308	0.528	0.729

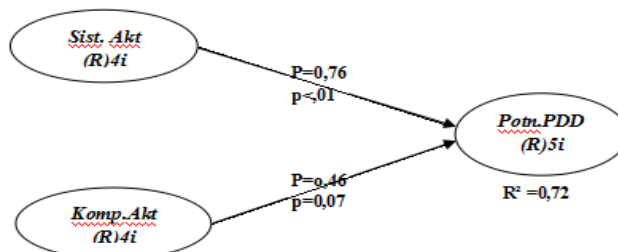
Sumber: Data Primer 2018 diolah

Matriks korelasi pada Tabel 4 menunjukkan terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara Kompetensi Akuntansi→Potensi Penyalahgunaan Dana Desa, ditunjukkan dengan koefisien korelasi signifikan. Terdapat hubungan positif antara Sistem Akuntansi→Potensi Penyalahgunaan Dana Desa, dengan koefisien korelasi signifikan.

Hasil Pengujian Model

Berikut adalah gambar hasil pengujian model pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi Akuntansi terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa.

Gambar 2. Hasil Model Penelitian



Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan software *warp PLS*, maka dapat dilihat tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 5. Direct effect dan Hipotesis

No	Jalur	Direct effect		Keterangan
		Koefisien	p-value	
1	Sistem Akuntansi → Potensi Penyalahgunaan Dana Desa	0,762	<,01	Hipotesis Diterima
2	Kompetensi Akuntansi → Potensi Penyalahgunaan Dana Desa	0,461	0,07	Hipotesis Diterima

Sumber: Data primer diolah 2018

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien Sistem Akuntansi terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa adalah sebesar 0,762 dan signifikansi sebesar <0,01, sehingga dapat di simpulkan hipotesis 1 diterima. Sedangkan Kompetensi Akuntansi terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa menunjukkan koefisien *direct effect* sebesar 0,461 dan signifikansi sebesar 0,07, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima.

Uji Goodness of Fit

Tabel 6. Goodness Of Fit

No	Jalur	Direct effect	
		Koefesien	P-value
1	APC	0,420	<,001
2	ARS	0,733	<,001
3	AVIF	1,236	<5

Sumber: Data primer 2018 yang diolah

Hasil pengujian model disajikan pada Tabel 6. Hasil estimasi model menunjukkan kriteria *goodness of fit* telah terpenuhi yaitu nilai APC dan ARS signifikan secara statistik dan AVIF kurang dari 5.

Pembahasan

Hubungan Sistem Akuntansi terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan penerapan Sistem Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyalahgunaan Dana Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien hasil penelitian sebesar 0,762 P-value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem Sistem Akuntansi maka potensi penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,308 dan koefisien determinasi (R^2) 0,729 menunjukkan penerapan Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Penyalahgunaan Dana Desa dan mempengaruhi 76,2% terhadap potensi penyalahgunaan dana desa,

sedangkan sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan sistem Akuntansi memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap potensi penyalahgunaan dana desa karena penerapan Sistem Akuntansi merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten Demak dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa.

Sistem akuntansi mempengaruhi potensi penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Demak. Hal ini disebabkan aparatur pemerintah desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan prosedur akuntansi. Aparatur desa di Kabupaten Demak menyatakan kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten Demak terhadap pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) ditingkat desa. Penelitian Ismail *et al.* (2016) mengenai sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa permasalahan utama yang timbul terkait pengelolaan dana desa adalah rendahnya pengetahuan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan dasar pendidikan kepala desa dan aparatnya bukan dari bidang akuntansi. Hanifa *et al.* (2016:75) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kepala desa memiliki keinginan dan harapan untuk diciptakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi untuk memudahkan pelaporan keuangan dana desa. Dengan demikian, Sistem Akuntansi yang baik didalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dana desa akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa di kabupaten Demak.

Hubungan Kompetensi Akuntansi terhadap Penyalahgunaan Dana Desa

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan penerapan Kompetensi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyalahgunaan Dana Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien hasil penelitian sebesar 0,461 P-value sebesar 0,07 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan Kompetensi Akuntansi maka potensi penyalahgunaan dana desa bisa diminimalisir. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,528 dan koefisien determinasi (R^2) 0,729 menunjukkan penerapan Kompetensi Akuntansi berpengaruh terhadap Penyalahgunaan Dana Desa dan mempengaruhi 46,1 % terhadap Penyalahgunaan Dana Desa, sedangkan sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan Kompetensi Akuntansi memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif serta transparan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif serta transparan, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan. Rendahnya kompetensi akuntansi maupun tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal ini didukung dengan hasil kuesioner dimana sebagian responden Aparatur Pemerintah Desa latar belakang pendidikannya di dominasi lulusan (SMA) serta responden menjawab ragu - ragu mengenai pengetahuan dan pemahaman dalam penyajian laporan keuangan, sehingga rendahnya kompetensi akuntansi Aparatur pemerintah desa akan mempengaruhi potensi penyalahgunaan dana desa. Kompetensi akuntansi merupakan aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja yang baik. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasikan kinerja. Hasil penelitian Yulianah (2015: 26) menyatakan bahwa potensi penyelewengan dana desa disebabkan oleh berbagai hal antara lain menggunakan dana desa untuk keperluan lain, mengalihkan dana desa untuk program lain, memasukkan kegiatan baru yang sebelumnya belum dilaksanakan, memanipulasi laporan keuangan, menutupi setoran PBB, pembelian untuk kebutuhan pribadi yang mengatasnamakan kebutuhan desa serta pengalokasian dana desa tidak sesuai ketentuan serta tidak melakukan kegiatan masyarakat yang seharusnya dibiayai dengan dan desa. Pawestri (2014: 16) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Audit yang berkualitas adalah yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang dipahami oleh orang-orang yang memiliki kompetensi akuntansi. Begitu juga halnya aparatur desa yang memiliki kompetensi akuntansi akan memahami prinsip akuntansi berterima umum sehingga laporan keuangan yang dilaporkan sebagai syarat memenuhi administrasi pelaporan penggunaan dana desa tidak terdapat penyelewengan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Demak. Hal ini disebabkan adanya penyusunan rencana, pelaksanaan proses akuntansi, prosedur pengumpulan, dan pelaporan data keuangan yang baik sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, serta sesuai dengan Prinsip akuntansi berterima umum yang pada akhirnya dapat meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa.
2. Kompetensi Akuntansi berpengaruh terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Demak. Kemampuan dan Pengetahuan, aparatur desa di bidang akuntansi dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa.

Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan analisis data dan intepretasi hasil, terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi, Kompetensi Akuntansi berpengaruh terhadap potensi Penyalahgunaan Dana Desa di kabupaten Demak sebesar 76,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sehingga perlu digunakan variabel lain yang mempengaruhi potensi penyalahgunaan dana desa di luar model ini.

2. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random *sampling* sehingga Aparatur Desa yang dijadikan sampel sebanyak 101 orang yang mewakili masing-masing Desa di Kabupaten Demak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan oleh peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah variabel dependen dan variabel *intervening*. Variabel yang disarankan diantaranya adalah Kompetensi akuntansi keuangan daerah, Kualitas laporan keuangan daerah dan Sistem Pengendalian Internal dalam meminimalisir Penyalahgunaan Dana Desa
2. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan obyek yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sholeh., Ahmad. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai Vol. 5 No. 2*
- Aspal, R. B. 2015. Telaah Kritis Sisi Probabilitas Negatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Atik, R., B. E. Purnama, dan Sukadi. 2008. Sistem informasi pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan. *Jurnal Speed Vol. 6 No.2 hal. 35-39*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 2015. Pedoman pengelolaan keuangan desa. Palembang: BPKP.
- Basri, C. 2014. Desa belum siap kelola dana desa yang besar. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Brodjonegoro, B. P. S. 2014. Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa dalam APBN?P 2015. Available at <http://www.kemenkeu.go.id>.
- Eko, S. 2014a. Desa membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- _____, 2014b. Kedudukan dan kewenangan desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Faozi, C. 2015. Harap-Harap Cemas Undang-Undang Desa. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- , C. 2015. Undang-undang desa, apakah mimpi buruk bagi aparatur pemerintah desa?. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanifa, Lia. Wawo, Andi Basru. Husin. 2016. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 2.*
- Hermanson, Edwards & Salmonson. (1989). *Accounting principles (4th ed.)*. Homewood, Boston: Richard D. Irwin Inc.
- Hoesada, J. 2014. Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Jakarta.
- Ismail, Muhammad. Widagdo, Ari Kuncara. Widodo, Agus. 2016. Sistem Akuntansi Pengelola Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. XIX No. 2.*
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Libby. R dan Lutf. J. (1993). *Determinant Of Judgement Performance In Accounting Setting: Ability, Knowledge, Motivation And Environment*. Accounting Organization And Society.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pawestri, Bias Nuansa Citra. 2014. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas dan Due Profesional Care Terhadap Kualitas Audit*. STIE Indonesia Banking School.
- Rifai. 2015. Pengusutan Dugaan Penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 Sebesar Rp 22 Milyar di Demak. wartanasional.com.
- Riyani, Nunuk. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan warp pls 3.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan pada acara orasi ilmiah di Bandung.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo

Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Widyatmini dan Luqman, H. 2008. Hubungan Kepemimpinan, Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Depok. *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 13 No 2*.

Yuliana, M. 2013. Desa kini dan masa depan dalam sudut pandang sisi dilematis UU Desa. Available at <https://www.academia.edu>.

Yulianah, Yuyun. 2015. Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Dikaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Mimbar Justitia Vol. 1 No. 2*.

Yuliani, S., Nadirsyah, dan U. Bakar. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 hal. 206-220*.